ANALISIS KESESUAIAN PENERAPAN PRODUK PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH* BERDASARKAN PSAK 106 PADA PT. BPRS HIKMAH WAKILAH

Lisandi Novisra^{*1}, Bustamam^{*2}

^{1,2}Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala
e-mail: sandi.nvsr@gmail.com^{*1}, bustamam@unsyiah.ac.id^{*2}

Abstract

This study aims to determine and analyze the application of musharakah financing products and the suitability of the accounting treatment of musharakah financing products applied in PT. BPRS Hikmah Wakilah according to PSAK 106. The research method used is descriptive qualitative. Sources of data in this study are primary data obtained directly from the results of interviews with respondents. The results of the study show that in terms of recognition and measurement of PT. BPRS Hikmah Wakilah is not fully comply in according to PSAK 106, and in terms of the presentation of PT. BPRS Hikmah Wakilah has fully complied with PSAK 106, while in terms of disclosure of PT. BPRS Hikmah Wakilah has not presented CALK and all terms relating to the musharakah transaction. Hence, its application does not comply with PSAK 106.

Keywords: *Musharakah Financing Products, PSAK 106*

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki penduduk beragama Islam terbanyak di dunia. Hal inilah yang seharusnya menjadi potensi atau faktor pendorong dalam perkembangan perbankan syariah di Indonesia dengan berbagai produk keuangan dan investasi yang berbeda dengan bank konvensional pada umumnya. Akan tetapi, pada praktiknya ternyata implementasi dari setiap produk-produk keuangan syariah tersebut belum dapat terealisasi secara optimal. Hal tersebut terjadi salah satunya disebabkan oleh pengawasan dan pengaturan yang masih cenderung tidak berjalan secara maksimal sehingga pada saat penerapannya masih ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan aturan dan standar yang berlaku (Republika, 2018).

Pada dasarnya bank syariah dan bank konvensional memiliki persamaan dalam hal teknis penerimaan uang, teknologi yang digunakan, dan mekanisme transfer (Machmud & Rukmana, 2010:17). Akan tetapi, adapun sejumlah perbedaan yang mendasar diantara keduanya yang terletak pada saat pembagian hasil, orientasi/tujuan, lembaga penyelesaian sengketa, lingkungan kerja, hubungan dengan nasabah, usaha yang dibiayai, produk pembiayaan/investasi dan aspek legalitas (Antonio, 2012:22).

Pada tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Sebagai hasil kerja tim Perbankan MUI tersebut terciptalah bank syariah pertama di Indonesia yaitu PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang berdiri pada tanggal 1 November 1991 dan pada tanggal 1 Mei 1992 BMI resmi beroperasi. Menurut data statistik Perbankan Syariah, hingga tahun 2018 sudah terdapat 13 Bank Umum Syariah (BUS), 21 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 168 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) (Otoritas Jasa Keuangan, 2018).

Pada umumnya, praktik perbankan syariah dengan bank konvensional hampir sama, yaitu bergerak sebagai suatu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada pihak yang membutuhkan dalam bentuk fasilitas pembiayaan (Yuranda & Daud, 2019). Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak untuk pihak lain dengan maksud untuk mendukung investasi yang akan dilaksanakan, baik perorangan maupun lembaga (Rivai & Arifin, 2010:681). Adapun jumlah komposisi pembiayaan yang disediakan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia yang dapat dilihat pada tabel 1.1.

Tabel 1.1
Komposisi Pembiayaan yang Disediakan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Akad	2016	2017	2018	
	Des	Des	Sep	Okt
Akad <i>Mudharabah</i>	156.029	124.497	179.484	175.279
Akad <i>Musyarakah</i>	797.621	776.696	809.215	808.636
Akad <i>Murabahah</i>	4.982.796	5.904.751	6.621.867	6.716.831
Akad <i>Salam</i>	14	0	0	0
Akad <i>Istishna</i>	9.423	21.426	28.917	30.450
Akad <i>Ijarah</i>	6.763	22.316	31.598	35.662
Akad <i>Qardh</i>	145.881	189.866	178.224	183.275
Akad <i>Multijasa</i>	515.523	724.398	830.337	840.895
Total	6.662.556	7.763.951	8.679.643	8.791.028

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2018)

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa banyak jenis pembiayaan yang disediakan oleh BPRS dan salah satu yang dapat meningkatkan pendapatan operasional bank tersebut ialah akad *musyarakah* (*joint ventura*). Pada tabel tersebut komposisi pembiayaan *musyarakah* cenderung tidak stabil setiap tahunnya hal ini dikarenakan banyaknya nasabah yang lebih tertarik dengan pembiayaan *murabahah* dibandingkan *musyarakah*.

Musyarakah menurut Zulkifli (2007:51) adalah akad kerjasama atau percampuran antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu yang sifatnya halal dan produktif dengan kesepakatan bahwa keuntungan akan dibagikan sesuai dengan *nisbah* yang disepakati dan risiko akan ditanggung sesuai porsi kerjasama. Hal selaras juga dipaparkan dalam fatwa DSN-MUI/IV Tahun 2000 nomor 8 bahwa akad *musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan sebuah usaha, yang masing-masing pihak mengeluarkan dana dengan perjanjian bahwa keuntungan maupun resiko akan di tanggung sesuai perjanjian pada saat awal mula akad.

Musyarakah dalam sistem perbankan biasanya diterapkan untuk pembiayan suatu kegiatan baik itu bentuk usaha atau pun proyek dimana pihak bank dan nasabah sama-sama menyediakan modal atau aset untuk pelaksanaan suatu kegiatan, setelah usaha atau proyek yang dilaksanakan selesai dikerjakan, pihak nasabah mengembalikan modal yang telah dipakai dengan keuntungan berdasarkan bagi hasil yang telah disepakati (Al-Arif, 2012:50). Berdasarkan ulama

fikih, *musyarakah* terbagi menjadi 2 yaitu, *syirkah al milk* yang memiliki arti kepemilikan bersama yang keberadaannya terjadi apabila terdapat dua orang atau lebih memperoleh kepemilikan bersama atas suatu aset. Kemudian *syirkah al'uqud* yang berarti kemitraan yang muncul karena adanya kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk bekerja sama demi tercapainya tujuan tertentu, kemudian didalam *syirkah al'uqud* terbagi lagi menjadi beberapa jenis antara lain, *syirkah abdan*, *syirkah wujuh*, *syirkah 'inan*, dan *syirkah mufawwaddah* (Nurhayati & Wasilah, 2015:151).

Produk pembiayaan *musyarakah* yang terus berkembang dilingkungan masyarakat tentu harus memiliki sebuah pedoman untuk mengatur sistem dan perlakuan akuntansi agar tidak terjadinya perbedaan antar satu bank syariah dengan bank syariah lainnya yang ada di Indonesia, maka dari itu Dewan Standar Akuntansi Keuangan mengesahkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 106 yang mengatur tentang akuntansi *musyarakah* pada tanggal 27 juni 2007.

Secara umum PSAK 106 membahas tentang karakteristik pembiayaan *musyarakah*, pengakuan dan pengukuran pembiayaan *musyarakah*, serta penyajian dan pengungkapan pembiayaan *musyarakah*. PSAK 106 juga memberikan pedoman untuk pengakuan akuntansi untuk mitra aktif dan mitra pasif, pada saat akad, selama akad berlangsung dan pada saat akad berakhir. Tidak hanya itu, PSAK 106 juga memberikan ketentuan minimum penyajian bagi mitra aktif dan mitra pasif, akan tetapi PSAK 106 tidak

mengatur perlakuan akuntansi atas obligasi syariah (sukuk) yang menggunakan akad *musyarakah*. Dalam PSAK 106 juga ditegaskan bahwa terdapat dua jenis produk pembiayaan *musyarakah* yakni *musyarakah* permanen dan *musyarakah mutanaqisah*.

Hasil penelitian terdahulu mengenai penerapan produk pembiayaan *musyarakah* berdasarkan PSAK 106 telah dilakukan oleh Widyarini & Hadi (2016), Asadov *et al.* (2016), Linaria & Chintya (2017), Meutia & Adam (2017), dan Jabar *et al.* (2018). Hasil penelitian masing-masing menunjukkan bahwa ternyata pada praktiknya produk pembiayaan *musyarakah* ini belum terimplementasikan dengan baik, terdapat beberapa kerancuan pada saat pengukuran dan penyajian akuntansi serta masih ada beberapa masalah praktis yang disarankan untuk dapat diselesaikan agar sesuai dengan tujuan terlaksananya akad *musyarakah* tersebut. Akan tetapi penelitian yang dilakukan oleh Susanto *et al.* (2017) menunjukkan bahwa PT. Bank Syariah Mandiri KC Manado telah menerapkan pembiayaan *musyarakah* yang sesuai dengan PSAK 106.

PT. BPRS Hikmah Wakilah sebagai lembaga keuangan yang memiliki pengaruh besar bagi masyarakat dan satu-satunya yang telah menerapkan produk pembiayaan *musyarakah* di Kota Banda Aceh sudah seharusnya berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah dan mempraktikkan perlakuan akuntansi yang sesuai dengan PSAK Nomor 106.

2. Kajian Pustaka

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Menurut Perwataatmadja & Antonio (2002:10), bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam khususnya yang menyangkut dengan tata cara bermuamalat dalam Islam, sehingga dapat mencapai kemashlahatan dalam pelaksanaan transaksi keuangan dan terhindar dari adanya unsur riba. Sementara itu, menurut Muhammad (2002:42), bank syariah adalah lembaga keuangan yang kegiatan operasionalnya berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits baik itu dalam hal penghimpunan, penyaluran dana dan jasa-jasa perbankan lainnya. Lebih jelasnya, bank syariah dimaksudkan sebagai suatu lembaga yang keuangannya dikelola menurut aturan yang dianggap sejalan dengan ketentuan syariah (Ruslizar & Rahmawaty, 2016).

Salah satu bentuk lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 menyebutkan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) yaitu Bank Syari'ah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Keberadaan BPRS ini diharapkan dapat memberikan layanan perbankan secara mudah, cepat, dan sederhana kepada masyarakat khususnya para pengusaha mikro, kecil, dan menengah (Adnan & Purwoko, 2013).

Jenis-Jenis Pembiayaan

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan juga menyebutkan bahwa pembiayaan itu merupakan penyediaan dana (uang) atau tagihan atau hal lainnya yang sejenis berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak penyedia dana (bank) dengan pihak lain (nasabah) yang nantinya uang tersebut harus dikembalikan dalam jangka waktu yang telah disepakati dengan imbalan bagi hasil. Ada beberapa jenis produk pembiayaan di dalam BPRS yang diperuntukkan untuk membantu para nasabah dalam menjalankan usaha yang dimilikinya, antara lain:

1) Pembiayaan *Mudharabah*

Menurut Vebitia & Bustamam (2017), *mudharabah* didefinisikan sebagai akad kerja sama di antara dua orang atau lebih yang ingin menjalankan usaha dimana *shahibul maal* mempercayakan modal kepada *mudharib* dengan sebuah perjanjian di awal. Keuntungan yang diperoleh akan dibagikan berdasarkan kesepakatan dan kerugian ditanggung oleh pemilik dana kecuali disebabkan oleh *misconduct*, *negligence* atau *violation* oleh pengelola dana.

2) Pembiayaan *Musyarakah*

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam PSAK 106, *musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih atas suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana, dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan di dalam kontrak, namun jika terjadi kerugian ditentukan berdasarkan porsi kontribusi dana.

3) Pembiayaan *Murabahah*

Menurut Hakim (2012:112) *murabahah* adalah akad jual beli atas suatu barang tertentu, dimana pada barang tersebut pihak telah menyebutkan

harga jual yang terdiri dari atas harga pokok barang dan tingkat keuntungan tertentu.

4) *Pembiayaan Salam*

Pembiayaan salam adalah pembelian barang yang pembayarannya dilunasi di muka/pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu, sedangkan penyerahan barang dilakukan di kemudian hari. Pembelian *salam* cenderung merupakan hasil dari pertanian yang memerlukan waktu relatif lama untuk memproduksinya.

5) *Pembiayaan Istishna*

Istishna' ini merupakan pengembangan dari *ba'i as-salam*, dimana waktu penyerahan barang dilakukan di kemudian hari sementara pembayaran dapat dilakukan melalui cicilan atau ditangguhkan (Zulkifli, 2007:41). Transaksi *istishna'* ini juga menerapkan sistem jual beli dengan barang yang diperjualbelikan lebih cenderung berupa manufaktur.

6) *Pembiayaan Ijarah*

Pembiayaan ijarah (sewa) didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri (Nurhayati & Wasilah, 2015:233).

Musyarakah

Ada banyak praktik pembiayaan syari'ah pada zaman Rasulullah SAW yang telah berkembang, salah satu nya ialah *syirkah* (perkongsian). Pada saat Nabi Muhammad SAW diutus sebagai nabi, banyak dari orang-orang pada saat itu bermuamalah dengan ber-*syirkah* dan itu akan terwujud apabila terciptanya asas sama-sama ridha di antara dua pihak atau lebih.

Musyarakah adalah akad kerjasama yang dilakukan oleh dua pihak antara pihak bank dengan pihak nasabah baik personal maupun kelompok untuk melakukan suatu usaha tertentu yang halal dan produktif dengan kesepakatan bahwa keuntungan akan dibagikan sesuai *nisbah* yang disepakati dan risiko yang ditanggung sesuai porsi kerjasama (Zulkifli, 2007:53). Berdasarkan ketentuan PSAK 106, terdapat 2 jenis dari pembiayaan *musyarakah*, yakni *musyarakah* permanen, dimana bagian dana setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad dan *musyarakah* menurun, dimana bagian dana salah satu mitra akan dialihkan

secara bertahap kepada mitra lainnya sehingga bagian dana dari pihak tersebut akan menurun dan pada akhir masa akad mitra lain tersebut akan menjadi pemilik penuh atas usaha *musyarakah* yang dijalankan.

Menurut Nurhayati & Wasilah (2015:155), rukun *musyarakah* terdiri dari : (1) pelaku usaha *musyarakah* yakni para mitra, (2) objek *musyarakah* berupa modal dan kerja, (3) ijab kabul atau serah terima, dan (4) nisbah keuntungan. Penetapan *nisbah* dalam akad *musyarakah* dapat ditentukan secara proporsional berdasarkan modal para mitra maupun tidak proporsional karena mempertimbangkan pengalaman, tanggung jawab, dan waktu bekerja. Perjanjian akad *musyarakah* dapat berakhir apabila salah satu pihak memutuskan untuk menghentikan akad, salah satu pihak meninggal atau kehilangan akal sehat dan modal dari *musyarakah* yang disetor oleh masing-masing pihak telah habis atau hilang.

Perlakuan Akuntansi Musyarakah Berdasarkan PSAK 106

Standar akuntansi untuk akad *musyarakah* diatur dalam PSAK 106 yang berlaku untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan. PSAK 106 adalah standar akuntansi yang menggantikan standar sebelumnya, yaitu PSAK 59 tentang akuntansi perbankan syariah. Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *musyarakah*.

1) Pengakuan dan Pengukuran Akuntansi untuk Mitra Aktif

- a. Investasi *musyarakah* diakui pada saat penyerahan kas atau aset nonkas untuk usaha *musyarakah*.
- b. Pengukuran investasi *musyarakah*, jika dalam bentuk kas maka dinilai sebesar jumlah yang diserahkan dan jika berbentuk aset nonkas maka akan dinilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dengan nilai buku aset nonkas maka selisih tersebut akan diakui sebagai selisih penilaian aset *musyarakah* dalam ekuitas dan akan diamortisasi selama masa akad.
- c. Aset nonkas *musyarakah* yang telah dinilai sebesar nilai wajar akan disusutkan dengan model biaya historis ditambah dengan penyusutan atas kenaikan nilai aset karena

penilaian kembali saat penyerahan aset nonkas untuk usaha *musyarakah*.

- d. Jika proses penilaian nilai wajar menghasilkan penurunan nilai aset, maka penurunan tersebut langsung diakui sebagai kerugian.
- e. Biaya yang terjadi akibat akad *musyarakah* tidak dapat diakui sebagai bagian dari investasi kecuali adanya persetujuan dari seluruh mitra.
- f. Penerimaan dana *musyarakah* dari mitra pasif diakui sebagai investasi *musyarakah* dan di sisi lain sebagai dana *syirkah temporer*.
- g. Bagian mitra aktif atas investasi *musyarakah* dengan pengembalian dana mitra pasif di akhir akad dinilai sebesar jumlah kas yang diserahkan dikurangi dengan kerugian atau sebesar nilai wajar aset nonkas pada saat diserahkan dikurangi penyusutan dan kerugian.
- h. Bagian mitra pasif atas investasi *musyarakah* menurun dinilai sebesar kas atau nilai wajar aset nonkas yang diserahkan pada awal akad ditambah dengan jumlah dana *syirkah temporer* yang telah dikembalikan kepada mitra pasif dan dikurangi kerugian (jika ada).
- i. Pada saat akad diakhiri, investasi *musyarakah* yang belum dikembalikan kepada mitra pasif diakui sebagai kewajiban.
- j. Pendapatan usaha *musyarakah* yang menjadi hak mitra aktif diakui sebesar hak nya sesuai dengan kesepakatan, sedangkan untuk mitra pasif sebesar haknya atas bagi hasil dan kewajiban.
- k. Kerugian investasi *musyarakah* diakui sesuai dengan porsi dana masing-masing mitra dan mengurangi nilai aset *musyarakah*.
- l. Jika kerugian akibat kelalaian atau kesalahan mitra aktif atau pengelola usaha maka mereka harus dapat menanggungnya.

2) Pengakuan dan Pengukuran Akuntansi untuk Mitra Pasif

- a. Investasi *musyarakah* diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada mitra aktif.

- b. Pengukuran investasi *musyarakah* dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan dan jika dalam bentuk aset nonkas dinilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat aset nonkas maka selisih tersebut dapat diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi selama masa akad atau jika kerugian maka diakui pada saat terjadinya.
- c. Investasi *musyarakah* nonkas yang diukur dengan nilai wajar aset yang diserahkan akan berkurang nilainya sebesar beban penyusutan atas aset yang diserahkan, dikurangi dengan amortisasi keuntungan tangguhan.
- d. Biaya yang terjadi akibat akad *musyarakah* (misalnya biaya studi kelayakan) tidak dapat diakui sebagai bagian investasi *musyarakah* kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra.
- e. Bagian mitra pasif atas investasi *musyarakah* dengan pengembalian dana mitra pasif diakhir akad dinilai sebesar jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha *musyarakah* pada awal akad dikurangi dengan kerugian atau sebesar nilai wajar aset *musyarakah* nonkas pada saat penyerahan untuk usaha *musyarakah* setelah dikurangi penyusutan dan kerugian (jika ada).
- f. Bagian mitra pasif atas investasi *musyarakah* menurun (dengan pengembalian dana mitra pasif secara bertahap) dinilai sebesar jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha *musyarakah* pada awal akad dikurangi jumlah pengembalian dari mitra aktif dan kerugian (jika ada).
- g. Pada saat akad diakhiri, investasi *musyarakah* yang belum dikembalikan oleh mitra aktif diakui sebagai piutang.
- h. Pendapatan usaha investasi *musyarakah* diakui sebesar bagian mitra pasif sesuai kesepakatan. Sedangkan kerugian investasi *musyarakah* diakui sesuai dengan porsi dana.

3) Penyajian akuntansi *musyarakah*

Mitra aktif menyajikan hal-hal sebagai berikut yang terkait dengan usaha *musyarakah* dalam laporan keuangan:

- Kas atau aset nonkas yang disisihkan oleh mitra aktif dan yang diterima dari mitra pasif disajikan sebagai investasi *musyarakah*.
- Aset *musyarakah* yang diterima dari mitra pasif disajikan sebagai unsur dana *syirkah temporer*.
- Selisih penilaian aset *musyarakah*, bila ada, disajikan sebagai unsur ekuitas.

Mitra pasif menyajikan hal-hal sebagai berikut yang terkait dengan usaha *musyarakah* dalam laporan keuangan:

- Kas atau aset nonkas yang diserahkan kepada mitra aktif disajikan sebagai investasi *musyarakah*
- Keuntungan tangguhan dari selisih penilaian aset nonkas yang diserahkan pada nilai wajar disajikan sebagai pos lawan (*contra account*) dari investasi *musyarakah*

4) Pengungkapan akuntansi *musyarakah*

Mitra mengungkapkan hal-hal yang terkait transaksi *musyarakah*, tetapi tidak terbatas, pada:

- Isi kesepakatan utama usaha *musyarakah*, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha *musyarakah*, dan lain-lain.
- Pengelola usaha, jika tidak ada mitra aktif
- Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah

Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting (Sugiyono, 2017:272). Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, PSAK No. 106 merupakan suatu standar atau pedoman yang mengatur terkait dengan akad *musyarakah*. Pemahaman terhadap PSAK No. 106 sangat diperlukan dalam penelitian ini untuk selanjutnya akan dianalisis sehingga dapat diperoleh hasil. Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan yang akan tertuju pada sesuai atau tidaknya antara penerapan produk pembiayaan *musyarakah* pada PT. BPRS Hikmah Wakilah dengan PSAK No. 106.

Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran

3. Metode Penelitian

Desain Penelitian

Menurut Sekaran & Bougie (2017:109) dalam sebuah penelitian pasti memiliki berbagai aktivitas yang terstruktur untuk dilaksanakan oleh peneliti yang dimulai dari perancangan hipotesis, teknik pengumpulan data, sampai dengan tahap analisis data, dan hal inilah yang disebut dengan desain penelitian. Perlu diketahui bahwa dalam merancang desain penelitian, seorang peneliti harus melakukannya dengan penuh kehati-hatian dikarenakan tahap ini merupakan hal yang sangat penting untuk dapat menjawab berbagai pertanyaan penelitian dengan tepat sehingga tujuan penelitian dapat tercapai secara sistematis.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yang dilakukan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian atau gejala sosial alamiah yang berdasarkan pada kenyataan di lapangan (Moleong, 2016:6). Tujuan dari penelitian ini adalah studi deskriptif yang didesain untuk menjelaskan karakteristik orang, kejadian atau situasi dari data yang dikumpulkan. Situasi studi penelitian ini adalah tidak diatur dan berlangsung secara normal dalam lingkungan yang alami.

Tingkat intervensi peneliti adalah minimum, dikarenakan peneliti tidak memiliki intervensi dalam mempengaruhi perkembangan dan penerapan akad *musyarakah* pada perbankan syariah. Unit analisis dalam penelitian ini adalah organisasi, yaitu PT. BPRS Hikmah Wakilah. Kemudian, horizon waktu yang digunakan adalah *cross sectional* yaitu penelitian yang hanya mengumpulkan data dalam satu periode saja untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang merupakan data yang diperoleh langsung oleh peneliti melalui wawancara dengan responden penelitian terkait dengan penerapan produk pembiayaan *musyarakah* pada PT. BPRS Hikmah Wakilah. Penelitian ini juga menggunakan data sekunder sebagai informasi pendukung dari sumber yang telah ada seperti buku-buku, jurnal, formulir pengajuan pembiayaan, jumlah nasabah yang menggunakan produk pembiayaan di PT. BPRS Hikmah Wakilah, dan lainnya.

Pengumpulan data dalam penelitian ini digunakan melalui beberapa teknik, yaitu:

- 1) Observasi, yang dilakukan dengan mengamati secara langsung situasi pada suatu lokasi penelitian dan mencatat berbagai hal penting terkait penerapan produk pembiayaan *musyarakah* dan kesesuaiannya dengan PSAK 106 (Arikunto, 2010:140).
- 2) Dokumentasi, berkenaan erat dengan data-data atau catatan penting dari suatu organisasi yang dibutuhkan untuk penelitian, seperti dokumen-dokumen, formulir, berkas, catatan penting yang berkaitan dengan produk pembiayaan *musyarakah* pada PT. BPRS Hikmah Wakilah.
- 3) Wawancara, merupakan bentuk tanya jawab untuk mengetahui dan menemukan masalah yang diperlukan dalam penelitian secara mendalam (Sugiyono, 2017:72). Penggunaan metode wawancara adalah untuk menelusuri dan menggali informasi yang tidak terbuka untuk umum. Teknik wawancara ini dilakukan secara langsung kepada Direktur Utama atau Kabag Marketing pada PT. BPRS Hikmah Wakilah.
- 4) Studi Kepustakaan, terkait dengan pemahaman terhadap berbagai literatur yang berkaitan dengan

produk pembiayaan *musyarakah* dan PSAK 106, serta bacaan lainnya.

Variabel Penelitian

- 1) Produk Pembiayaan *Musyarakah*, merupakan bentuk kerjasama untuk melakukan suatu usaha tertentu yang terdiri dari beberapa pihak untuk menyerahkan kontribusi dana dengan aturan bahwa keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian ditanggung berdasarkan porsi dana.
- 2) Perlakuan Akuntansi Berdasarkan PSAK 106
PSAK 106 merupakan salah satu pedoman yang membahas terkait dengan akuntansi *musyarakah*. PSAK 106 secara tegas mengatur mengenai karakteristik pembiayaan *musyarakah*, pengakuan dan pengukuran, akuntansi untuk mitra aktif dan mitra pasif dan pengakuan hasil usaha, serta terkait dengan penyajian dan pengungkapan laporan keuangan.

Metode Analisis Data

- 1) Pada tahap awal dimulai dari menganalisis kondisi PT. BPRS Hikmah Wakilah secara umum baik dari struktur maupun kebijakan yang diperlakukan dan mengumpulkan data, catatan, dokumen resmi dan dokumentasi yang tersedia dari berbagai sumber informasi terkait dengan produk pembiayaan *musyarakah* pada PT. BPRS Hikmah Wakilah. Kemudian juga mengumpulkan data dari hasil wawancara dengan Direktur Utama atau Kabag Marketing pada PT. BPRS Hikmah Wakilah serta dari hasil pengamatan dan catatan lapangan yang dilakukan peneliti.
- 2) Data yang telah dikumpulkan kemudian di buat abstraksi yang merupakan kegiatan untuk membuat rangkuman atau inti dari informasi yang diperoleh dengan tetap memperhatikan informasi yang berbentuk rahasia dan tidak perlu di ketahui oleh khalayak umum. Dalam hal membuat abstraksi peneliti juga membuat ringkasan terkait proses pemberian produk pembiayaan *musyarakah* dan bagaimana kebijakan yang diterapkan oleh PT. BPRS Hikmah Wakilah.
- 3) Tahap selanjutnya adalah menyusun data yang telah dirangkum berdasarkan karakteristik tertentu untuk lebih memahami penerapan produk pembiayaan *musyarakah*.

- 4) Setelah itu, melakukan pemeriksaan atas keabsahan data yang bisa dilakukan melalui triangulasi (pembanding) yang merupakan teknik untuk menilai keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu sendiri sebagai pembanding atas suatu data (Moleong, 2016:330). Keabsahan data ini dapat dilihat dari kesesuaian dengan PSAK No.106 tentang akuntansi *musyarakah*.
- 5) Memberikan alternatif dan rekomendasi sebagai pemecahan masalah jika setelah dilakukan analisa terdapat kesalahan.
- 6) Tahapan akhir yaitu menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang telah didapatkan sekaligus memberi masukan positif pada PT. BPRS Hikmah Wakilah.

Pada penelitian ini yang diamati ialah penerapan, pencatatan, dan perlakuan akuntansi *musyarakah* yang berlangsung di PT. BPRS Hikmah Wakilah, dengan memperhatikan dokumen pelengkap seperti persyaratan pengajuan pembiayaan *musyarakah*, ketentuan, alur dari penerapan pembiayaan *musyarakah* sehingga nantinya akan dibandingkan dengan ketentuan berdasarkan PSAK 106 untuk mengetahui kesesuaian antara praktik dilapangan dengan pedoman yang mengatur mengenai pembiayaan *musyarakah*.

Metode analisis data ini juga memperhatikan dengan jelas terkait dengan pengakuan dan pengukuran yang diterapkan terhadap produk *musyarakah* pada PT. BPRS Hikmah Wakilah. Pengakuan merupakan proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan atas suatu transaksi dalam satuan moneter (rupiah) sehingga akan mempengaruhi suatu pos yang nantinya akan terefleksikan dalam laporan keuangan. Dalam hal ini bermakna bahwa apakah suatu transaksi yang terkait dengan penyusutan, pendapatan, beban, perpindahan kepemilikan dan lainnya yang terkait dengan pembiayaan *musyarakah* telah di catat (jurnal) atau tidak oleh PT. BPRS Hikmah Wakilah. Sedangkan pengukuran itu sendiri lebih kepada penetapan jumlah rupiah yang harus dilekatkan pada suatu transaksi keuangan. Dengan demikian, berdasarkan data yang diperoleh, maka dapat diketahui apakah penerapan produk pembiayaan *musyarakah* telah sesuai atau tidak dengan PSAK 106.

4. Hasil dan Pembahasan

Sejarah PT. BPRS Hikmah Wakilah

PT. BPRS Hikmah Wakilah didirikan pada tanggal 14 September 1994 berdasarkan tatacara dan konsep syariah. Sejak pertama kali beroperasi tahun 1995 PT. BPRS Hikmah Wakilah berkantor di Jalan Krueng Raya Desa Baet, Kabupaten Aceh Besar. Pada masa itu Aceh sedang mengalami konflik dan kemudian tahun 2001 pindah ke Jeulingke, Banda Aceh.

Seiring berjalannya waktu, tahun 2004 Aceh dilanda tsunami dan menyebabkan kantor PT. BPRS Hikmah Wakilah rusak semua. Konflik dan tsunami yang telah terjadi ini tentu memiliki dampak yang cukup signifikan sehingga kondisi keuangan saat itu sangat sulit dan tidak sehat bahkan hampir likuidasi dan harapan yang dimiliki hanyalah pemegang saham agar mau melakukan penyuntikan dana agar bank dapat beroperasi secara normal, namun dikarenakan posisi keuangan bank sangat buruk untuk memperoleh tambahan dana dari pemegang saham begitu sulit.

Pada tahun 2006, jumlah modal disetor bank ditingkatkan untuk mencapai standar minimum yang disyaratkan oleh Bank Indonesia (Rp 1 Milyar untuk bank yang berposisi di Kota Banda Aceh), yang memungkinkan PT. BPRS Hikmah Wakilah pindah ke kantor yang baru dipusat kota. Sehingga pada bulan November 2006 PT. BPRS Hikmah Wakilah berlokasi di Peunayong Banda Aceh. Dengan manajemen dan tata kelola yang baru akhirnya PT. BPRS Hikmah Wakilah dapat menunjukkan perubahan dan pencapaian kinerja yang semakin baik, sehat, amanah, dan transparan.

PT. BPRS Hikmah Wakilah juga diharapkan terus berfokus dalam melayani UKM yang menginginkan proses cepat, pelayanan tanggap, syarat dan sistem yang mudah serta lebih fleksibel. PT. BPRS Hikmah Wakilah juga mempunyai pihak marketing yang dapat menjemput setoran dan penarikan tabungan/deposito, hal tersebut disediakan karena sesuai dengan kebutuhan masyarakat UKM yang cenderung tidak bisa meninggalkan usahanya. Hingga saat ini, PT. BPRS Hikmah Wakilah terus melakukan perluasan jaringan kantor, kreativitas, penyempurnaan produk-produk, peningkatan pelayanan terhadap para nasabah, dan pemaksimalan pertanggungjawaban terhadap *stakeholder* dan

masyarakat luas. Hal ini dilakukan agar harapan dan keinginan nasabah dapat diwujudkan dan kehadiran PT. BPRS Hikmah Wakilah dapat menjadi jembatan permodalan terhadap pelaku usaha.

Jumlah personalia PT. BPRS Hikmah Wakilah saat ini sebanyak 48 orang yang terdiri dari 2 orang Dewan Komisaris, 2 orang Dewan Pengawas Syariah, 1 orang Direktur Utama, 1 orang Direktur Operasional, 1 Orang Internal Audit, 14 orang di Bagian Operasional Kantor Pusat, 9 orang di Bagian Marketing Kantor Pusat, 6 orang di Kantor Cabang Lambaro, 6 orang di Kantor Cabang Ulee Kareng, 3 orang di Kantor Kas Darussalam, dan 3 orang di Kantor Kas Keutapang.

Visi dan Misi PT. BPRS Hikmah Wakilah

Visi nya adalah menjadi BPRS terbaik di Provinsi Aceh dan menjadikan BPRS yang mampu melayani masyarakat ekonomi kecil di Provinsi Aceh. Sedangkan misinya adalah dapat menjalankan prinsip syariah secara konsisten dan konsekuen, fokus terhadap usaha kecil dan mikro, menjadikan pasar

tradisional sebagai *captive market* dan membuka jaringan pemasaran di Provinsi Aceh yang memiliki potensi ekonomi baik.

Pembahasan

Pembiayaan *musyarakah* merupakan satu-satunya pembiayaan yang hanya ada penerapannya pada PT. BPRS Hikmah Wakilah di Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar, hal ini dikarenakan produk pembiayaan ini membutuhkan sejumlah dana yang besar untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang pada umumnya di sektor konstruksi. Awalnya pada PT. BPRS Hikmah Wakilah hanya terdapat pembiayaan *mudharabah* dengan modal dari bank sebesar 100%, namun seiring perkembangan dengan kecanggihan IT untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat akhirnya pada tahun 2015 produk pembiayaan *musyarakah* ini diterapkan. Adapun berbagai produk pembiayaan yang terdapat di PT. BPRS Hikmah Wakilah yang terdapat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1
Produk Pembiayaan pada PT. BPRS Hikmah Wakilah

Jenis Pembiayaan	Jumlah Nasabah	Jumlah Pembiayaan (Plafon)
<i>Murabahah</i>	1.162	Rp 67.660.422.407
<i>Mudharabah</i>	22	Rp 4.209.000.000
<i>Musyarakah</i>	14	Rp 6.270.000.000
<i>Multijasa</i>	32	Rp 1.182.000.000
<i>Ijarah</i>	13	Rp 277.000.000
Total	1.243	Rp 79.598.422.407

Sumber: Data diolah (2019)

Berdasarkan pada tabel 4.1, dapat dilihat bahwa berdasarkan jumlah nasabah produk pembiayaan *musyarakah* berada di urutan ke-4 peminatnya, akan tetapi jika berdasarkan jumlah nominal dari pembiayaan (plafon) yang diberikan, maka produk pembiayaan *musyarakah* ini berada di urutan ke-2, hal ini dikarenakan jumlah nasabah yang tertarik pada produk ini masih belum tinggi karena cenderung kebutuhan masyarakat lebih kepada produk pembiayaan *murabahah*, meskipun begitu nilai dari produk pembiayaan *musyarakah* ini cenderung tinggi dikarenakan proyek yang dibiayai adalah proyek yang membutuhkan dana yang besar.

Rincian nasabah dan jumlah plafon yang diberikan untuk pembiayaan *musyarakah* pada PT.

BPRS Hikmah Wakilah periode April 2019 dapat dilihat secara jelas pada tabel 4.2.

Tabel 4.2
Rincian Pembiayaan *Musyarakah* di PT. BPRS Hikmah Wakilah

No	Nama	Plafon
1.	Tuan A	Rp 270.000.000
2.	Tuan B	Rp 750.000.000
3.	Tuan C	Rp 120.000.000
4.	Tuan D	Rp 750.000.000
5.	Tuan E	Rp 100.000.000
6.	Tuan F	Rp 350.000.000
7.	Tuan G	Rp 750.000.000

No	Nama	Plafon
8.	Tuan H	Rp 750.000.000
9.	Tuan I	Rp 560.000.000
10.	Tuan J	Rp 750.000.000
11.	Tuan K	Rp 70.000.000
12.	Tuan L	Rp 300.000.000
13.	Tuan M	Rp 250.000.000
14.	Tuan N	Rp 500.000.000
	Total	Rp 6.270.000.000

Sumber: Data diolah (2019)

Dapat dilihat pada tabel 4.2, bahwa jumlah plafon yang disediakan oleh PT. BPRS Hikmah Wakilah untuk setiap nasabah memiliki jumlah yang berbeda-beda dengan nilai maksimal Rp 750.000.000 dan nilai minimal Rp 70.000.000, dan untuk jumlah total keseluruhan pembiayaan *musyarakah* ini mencapai sebesar Rp 6.270.000.000, baik untuk pembiayaan modal kerja maupun pembiayaan serbaguna.

Prosedur Pengajuan Pembiayaan *Musyarakah* pada PT. BPRS Hikmah Wakilah

Adapun prosedur yang harus dilalui oleh para calon nasabah yang ingin mengajukan produk pembiayaan *musyarakah* yang terdiri dari:

- 1) Calon nasabah mendatangi PT. BPRS Hikmah Wakilah dan mengajukan permohonan produk pembiayaan *musyarakah* serta menjelaskan terkait dengan maksud dan tujuan pengajuan tersebut. Kemudian pihak PT. BPRS Hikmah Wakilah diwakili oleh bagian *account officer* atau *teller* menjelaskan terkait dengan prosedur pelaksanaan, formulir yang harus diisi dan dokumen yang harus dipersiapkan oleh calon nasabah agar pengajuan tersebut dapat diproses.
- 2) PT. BPRS Hikmah Wakilah melakukan verifikasi dan validitas kelengkapan dokumen yang dipersiapkan oleh calon nasabah kurang lebih dalam waktu 7 hari kerja.
- 3) Setelah pihak marketing dari PT. BPRS Hikmah Wakilah menindaklanjuti permohonan dari calon nasabah dengan melakukan verifikasi atas kelengkapan dokumen, selanjutnya dilakukan uji kelayakan melalui analisis pembiayaan yang telah disyaratkan oleh Bank Indonesia dan Undang-Undang Perbankan yang berlaku terkait dengan pengajuan pembiayaan. Analisis tersebut meliputi:

a) *Character* (Karakter)

Untuk melihat kepribadian atau karakter dari calon nasabah apakah bisa dipercaya atau tidak dalam menjalin kerjasama sehingga dapat meminimalisir kemungkinan buruk yang mungkin terjadi dikemudian hari.

b) *Capacity* (Kapasitas)

Untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam melunaskan kewajiban dari produk pembiayaan yang diajukan.

c) *Capital* (Modal)

Bertujuan untuk memastikan bahwa calon nasabah telah memiliki modal sendiri sehingga PT. BPRS Hikmah Wakilah hanya menambahkan modal saja bukan memberikan dana 100% untuk produk pembiayaan *musyarakah* ini.

d) *Condition* (Kondisi)

Untuk melihat apakah terdapat pengaruh lainnya yang berasal bukan dari pihak bank maupun calon nasabah, seperti kondisi ekonomi, regulasi yang ditetapkan pemerintah, situasi politik, dan lainnya.

e) *Collateral* (Jaminan)

Dilakukan untuk menilai jaminan yang diberikan oleh calon nasabah baik berbentuk fisik maupun non fisik, nilai jaminan tersebut harus lebih besar atau minimal sama dengan total nilai pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank. Dalam hal ini, notaris memegang peranan penting sebagai perantara hukum untuk dapat mengikat jaminan sehingga jika terjadi wanprestasi atau *moral hazard* maka jaminan ini dapat menjadi pengganti sesuai dengan kesepakatan diantara pihak yang terikat.

- 4) Selanjutnya, PT. BPRS Hikmah Wakilah melakukan survei ke lokasi untuk melihat tempat yang nantinya akan dibangun proyek/usaha.
- 5) Setelah permohonan pengajuan pembiayaan disetujui, semua data telah lengkap dan memenuhi persyaratan yang ditentukan serta survei telah dilaksanakan, kemudian PT. BPRS Hikmah Wakilah menyusun proposal pembiayaan atau memorandum usulan pembiayaan yang ditujukan kepada komite pembiayaan sebagai pihak yang paling berwenang dalam hal ini. Komite pembiayaan yang nantinya akan melanjutkan

kepada direktur untuk menyetujui apakah dilanjutkan ke tahap pengikatan pembiayaan melalui akad atau penolakan atas permohonan pengajuan pembiayaan tersebut. Apabila keputusannya diterima maka berkas dari calon nasabah sampai ke bagian legal untuk proses pencairan dana akan tetapi jika keputusannya ditolak maka berkas tersebut akan dikembalikan kepada calon nasabah.

- 6) Setelah mendapatkan persetujuan dan berkas telah masuk ke bagian legal, selanjutnya kabag marketing memberikan Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) kepada calon nasabah yang didalamnya mengatur terkait dengan persyaratan yang harus dipenuhi, biaya yang akan ditanggung nasabah, asuransi, angsuran dari pokok pembiayaan, dan hal lainnya.
- 7) Setelah calon nasabah menyetujui suat SP3 tadi, kemudian akad pembiayaan *musyarakah* ini dilaksanakan dan nasabah mendatangi akad tersebut didepan notaris.
- 8) Setelah akad ditanda tangani, maka kewajiban nasabah adalah melunaskan pokok pembiayaan pada waktu yang telah disepakati dalam perjanjian akad dan ketika adanya keuntungan maka harus dibagi hasilnya secara proporsional sesuai dengan kesepakatan, begitu pula jika terjadi kerugian.
- 9) Bagian admin pembiayaan kemudian menginput data nasabah untuk pencairan pembiayaan *musyarakah* ini.
- 10) Setelah semua prosedur selesai, selanjutnya bagian *teller* akan memberikan dana yang telah dicairkan kepada nasabah.
- 11) Pihak *Account Officer* (AO) akan melakukan pemantauan secara intensif dan periodik terhadap proyek yang dilaksanakan menggunakan produk pembiayaan *musyarakah* ini untuk memastikan bahwa kewajiban nasabah akan direalisasikan dengan baik dan tepat waktu sesuai perjanjian, dan selanjutnya meminta laporan yang wajib disampaikan nasabah kepada PT. BPRS Hikmah Wakilah.

Kesesuaian Penerapan Produk Pembiayaan *Musyarakah* Berdasarkan PSAK 106 pada PT. BPRS Hikmah Wakilah

Pengakuan dan Pengukuran

- 1) Berdasarkan PSAK 106 dijelaskan bahwa investasi dicatat pada saat penyerahan kas atau aset nonkas kepada mitra aktif, dan hal tersebut telah sesuai implementasinya pada PT. BPRS Hikmah Wakilah, dimana pada saat kas diserahkan kepada nasabah pada saat itu juga PT. BPRS Hikmah Wakilah langsung mencatatnya sebagai investasi *musyarakah*.
- 2) Berdasarkan PSAK 106 pengukuran investasi *musyarakah* jika dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan dan untuk aset nonkas maka sebesar nilai wajar, dan hal tersebut telah diterapkan dengan sesuai pada PT. BPRS Hikmah Wakilah, akan tetapi hanya saja untuk aset nonkas sampai saat ini belum tersedia.
- 3) Sesuai ketentuan yang terdapat pada PSAK 106, segala biaya yang terjadi akibat akad *musyarakah* tidak dapat diakui sebagai bagian dari investasi kecuali adanya persetujuan dari seluruh mitra. Hal tersebut ternyata penerapannya belum sesuai di PT. BPRS Hikmah Wakilah, dikarenakan jika terdapat biaya-biaya yang timbul pada saat pengurusan akad maka langsung dibebankan secara otomatis terhadap nasabah tanpa adanya konfirmasi terlebih dahulu untuk meminta persetujuan, termasuk biaya studi kelayakan dan lainnya.
- 4) Bagian mitra pasif dinilai sebesar jumlah kas yang diserahkan pada saat akad dan jika terdapat kerugian maka harus dikurangi terlebih dahulu, dan hal tersebut telah sesuai diterapkan oleh PT. BPRS Hikmah Wakilah, dimana pengembalian yang diterima sesuai dengan jumlah kas yang diserahkan untuk usaha dan ditambah dengan bagi hasil yang disepakati kemudian dikurangi kerugian yang terjadi selama akad berlangsung.
- 5) Dalam ketentuan PSAK 106, bagian mitra pasif atas investasi *musyarakah* menurun ialah sebesar kas yang diserahkan pada awal akad dikurangi dengan jumlah pengembalian dari mitra aktif dan kerugian. Hal tersebut belum sesuai di PT. BPRS Hikmah Wakilah dikarenakan nasabah akan mengembalikan dana milik PT. BPRS Hikmah Wakilah secara permanen pada akhir akad dengan

jumlah kas yang dibayarkan pada awal akad ditambah dengan bagi hasil sesuai kesepakatan dan dikurangi dengan kerugian jika ada. Hal ini juga didasarkan pada jenis usaha yang didanai PT. BPRS Hikmah Wakilah melalui pembiayaan *musyarakah* saat ini hanya disektor konstruksi saja.

- 6) Pada akhir akad, PT. BPRS Hikmah Wakilah mengakui investasi *musyarakah* sebagai piutang jika pada akhir akad nasabah belum mengembalikannya, dan hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang ada pada PSAK 106.
- 7) PT. BPRS Hikmah Wakilah telah mengakui keuntungan berdasarkan kesepakatan, dan hal tersebut sesuai dengan ketentuan PSAK 106. Akan tetapi pada saat terjadi kerugian sudah tidak sesuai dengan ketentuan PSAK 106 dikarenakan pengakuannya bukan berdasarkan pada porsi dana melainkan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

Penyajian

PSAK 106 memaparkan bahwa penyajian untuk mitra pasif terkait usaha *musyarakah* dalam laporan keuangan menyajikan:

- a) Kas atau aset nonkas yang diserahkan kepada mitra aktif disajikan sebagai investasi *musyarakah*.
- b) Keuntungan tangguhan dari selisih penilaian aset nonkas yang diserahkan pada nilai wajar disajikan sebagai pos lawan (*contra account*) dari investasi *musyarakah*.

Hal tersebut telah sesuai diterapkan pada PT. BPRS Hikmah Wakilah bahwa nilai dari investasi *musyarakah* di masukkan kebagian aset pada laporan posisi keuangan.

Pengungkapan

Mitra mengungkapkan hal-hal yang terkait transaksi *musyarakah*, tetapi tidak terbatas, pada:

- a. Isi kesepakatan utama usaha *musyarakah*, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha *musyarakah*, dan lain-lain.
- b. Pengelola usaha, jika tidak ada mitra aktif
- c. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah

PT. BPRS Hikmah Wakilah belum menyajikan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) dan seluruh hal terkait dengan transaksi *musyarakah*

seperti porsi dana, kesepakatan bagi hasil, aktivitas usaha yang dijalankan dari pembiayaan tersebut serta hal lainnya yang disyaratkan dalam ketentuan PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam hal pengungkapan PT. BPRS Hikmah Wakilah belum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PSAK 106.

5. Kesimpulan, Keterbatasan, dan Saran

Kesimpulan

- 1) PT. BPRS Hikmah Wakilah dalam menentukan keuntungan maupun kerugian didasarkan oleh kesepakatan para mitra dengan sifat yang transparan dan dapat dilakukan negosiasi, hal tersebut tentu berbeda dengan bank konvensional pada umumnya yang menerapkan unsur riba.
- 2) PT. BPRS Hikmah Wakilah telah memelihara kepercayaannya terhadap para nasabah. Mereka tidak memberlakukan sanksi atau denda atas keterlambatan pembayaran pokok pembiayaan *musyarakah*. Tetapi, membuat kebijakan-kebijakan dengan tetap menentukan batasan toleransi terhadap nasabahnya tersebut.
- 3) Apabila ditinjau dari kesesuaian perlakuan akuntansi yang berdasarkan pada PSAK 106, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
 - a. Dari segi pengakuan dan pengukuran, PT. BPRS Hikmah Wakilah telah menerapkannya sesuai dengan PSAK 106, hanya saja dalam pengakuan biaya yang terjadi akibat akad *musyarakah* secara otomatis langsung dibebankan kepada nasabah tanpa adanya konfirmasi untuk mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dan ini tentu tidak sesuai dengan ketentuan PSAK 106. Kemudian, PT. BPRS Hikmah Wakilah juga tidak menerapkan model investasi *musyarakah* menurun seperti yang diatur dalam PSAK 106, karena penerapan yang ada hanyalah secara permanen. Hal tersebut bermakna bahwa nasabah akan mengembalikan dana milik PT. BPRS Hikmah Wakilah pada akhir akad dengan jumlah kas pada saat diserahkan ke nasabah ditambah dengan bagi hasil dan dikurangi dengan kerugian jika ada. Selanjutnya, PT. BPRS Hikmah Wakilah juga tidak memperlakukan kerugian sesuai porsi dana seperti yang diatur dalam PSAK 106,

melainkan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

- b. Dari segi penyajian, PT. BPRS Hikmah Wakilah telah sesuai penerapannya dengan ketentuan PSAK 106 yaitu kas yang diserahkan untuk usaha *musyarakah* diakui sebagai investasi *musyarakah* dan disajikan dalam laporan keuangan bagian aset pada laporan posisi keuangan (neraca).
- c. Dari segi pengungkapan, PT. BPRS Hikmah Wakilah belum menyajikan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) dan seluruh hal terkait dengan transaksi *musyarakah* seperti porsi dana, kesepakatan bagi hasil, aktivitas usaha yang dijalankan dari pembiayaan tersebut serta hal lainnya yang disyaratkan dalam ketentuan PSAK 101.

Keterbatasan

- 1) Penelitian ini masih memiliki kekurangan dalam hal pengumpulan data, seluruh informasi terkait dengan pembiayaan *musyarakah* tidak dapat diperoleh karena menjadi rahasia perusahaan.
- 2) Peneliti tidak melakukan studi lebih lanjut mengenai alasan yang rinci terkait dengan beberapa poin dari pernyataan yang terdapat pada PSAK 106 yang sampai saat ini belum diterapkan.

Saran

Saran Akademis

- 1) Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memilih objek penelitian yang tidak hanya pada PT. BPRS Hikmah Wakilah, melainkan BPRS lain yang ada di Aceh sehingga dapat dilihat perbandingannya.
- 2) Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan produk pembiayaan lain yang terdapat di PT. BPRS Hikmah Wakilah untuk dilihat kesesuaiannya dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang mengaturnya.

Saran Praktis

- 1) Bagi PT. BPRS Hikmah Wakilah, diharapkan untuk pembiayaan *musyarakah* ini secara keseluruhan dapat mengacu dan sesuai dengan ketentuan PSAK 106, termasuk untuk jenis produk pembiayaan lainnya.

- 2) Bagi PT. BPRS Hikmah Wakilah diharapkan dapat terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas dari setiap produk-produk pembiayaan
- 3) Diharapkan PT. BPRS Hikmah Wakilah dapat melakukan sosialisasi secara kontinu untuk seluruh sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan terkait dengan ketentuan perbankan syariah dan ketentuan PSAK, sehingga pada saat praktiknya sudah tidak terdapat lagi ketidaksesuaian.

Daftar Pustaka

- Adnan, M., & Purwoko. (2013). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Rendahnya Pembiayaan Mudharabah Menurut Perspektif Manajemen Bank Syariah Dengan Pendekatan Kritis. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 14, 14-31.
- Al-Arif, Nur Rianto. (2012). *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: Alfabeta.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2012). *Bank Syariah dari Teori Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Arikunto, Suharsimi. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Asadov, Alam, Zulkarnaen Bin Muhammad Sori, Shamsheer Ramadilli, Zaheer Anwer, dan Shinaj Shamsudheen. (2016). Musharakah Mutanaqisah Home Financing: Issues In Public. *Journal Of Islamic Accounting And Business Research*, 1-14.
- Hakim, Lukman. (2012). *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Erlangga.
- Jabar, Norbaizurah Abdul, Razli Ramli, dan Sazali Abidin. (2018). Understanding the musharakah mutanaqisah of Koperasi Pembiayaan Syariah Angkasa (KOPSYA). *International Journal Of Islamic Finance*, 10(1), 62-77.
- Linaria dan Aprina Chintya. (2017). Penerapan PSAK No. 106 Pada Perlakuan Akuntansi *Musyarakah* Di BMT Al-Ihsan Metro Lampung. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(1), 32-46.
- Machmud, Amir dan Rukmana. (2010). *Bank Syariah, Teori, kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*. Jakarta: Erlangga.

- Meutia, Intan dan Mohamad Adam. (2017). Dissecting implementation musharakah in Islamic bank in Indonesia: a case study. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 21(1), 61-69.
- Moleong, Lexy. J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad. (2002). *Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nurhayati, Sri dan Wasilah. (2015). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Perwataatmadja, Karnaen dan Muhammad Syafi'i Antonio. (2002). *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf.
- Republika. (2018). Penyebab Perkembangan Bank Syariah di Indonesia Lambat. *Republika.co.id* (online). Hari Sabtu, 08 Desember 2018. (<https://www.republika.co.id/amp/pjdd1q383>). Diakses 05 Mei 2019.
- Republik Indonesia. (1998). *Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan*
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*.
- Rivai, Veithzal dan Arviyan Arifin. (2010). *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ruslizar dan Rahmawaty. (2016). Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Mudharabah, Financing To Deposit Ratio, Dan Suku Bungan Deposito Terhadap Pertumbuhan Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 1(2), 84-90.
- Sekaran, Uma dan Roger Bougie. (2017). *Metode Penelitian untuk Bisnis Pendekatan Pengembangan-Keahlian*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susanto, Navadila Frurizka, jenny Morasa, dan Heinco R.N Wokas. (2017). Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan *Musarakah* Menurut PSAK No. 106 di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Manado. *Jurnal EMBA*, 5(2), 2277-2285.
- Vebitia dan Bustamam. (2017). Analisis Preferensi Masyarakat Terhadap Prinsip Bagi Hasil Pada Bank Syariah di Wilayah Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 2(1), 98-107.
- Widyarini dan Syamsul Hadi. (2016). Fatwa MUI, PSAK, dan Praktik Musarakah. *Journal Of Islamic Law*, 15(1), 1-162.
- Yuranda, A., & Daud, R. M. (2019). Analisis Akad Pembiayaan Murabahah Perumahan (KPR) Pada PT.Bank BRI Syariah KC Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 4(1), 52-61.
- Zulkifli, Sunarto. (2007). *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim.